

HARIAN

LENTERA*Inspirasi Perubahan* **TODAY**HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
SurabayaMelihat bola,
mengejanya, membuatku
menjadi orang paling
bahagia di dunia.Diego Maradona,
Pesepakbola (1960-2020)

EDISI JUMAT / 27 November 2020

EKSPOR BENUR STOP SEMENTARA

**NELAYAN HEPI,
EKSPORTIR GIGIT JARI**

SCAN ME

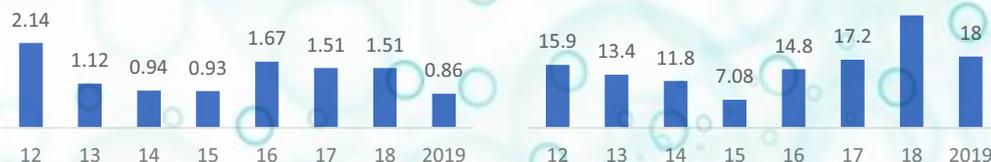
Penangkapan dan penetapan Eks-Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan korupsi ekspor benur juga memukul telak para eksportir. Baru sekitar 6 bulan 'berpesta' karena pembukaan kembali keran ekspor benih lobster, pemerintah memutuskan menghentikan sementara kebijakan yang diputuskan Edhy Prabowo. Dalam sehari saja, eksportir benur harus menelan kerugian sekitar Rp 10 miliar. Tak hanya dari segi ekonomi, kalangan pengusaha yang pernah 'main' dengan Edhy juga deg-degan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen menelusuri perusahaan hingga partai politik (Parpol) yang terlibat dalam 'kongkalikong' ini. Di sisi lain, nelayan bisa tersenyum hepi karena izin ekspor benur selama ini merugikan mereka. Duh! Di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi, sektor perikanan dan kelautan RI pun terimbas gelombang 'tsunami korupsi' Edhy.

Baca Hal 11

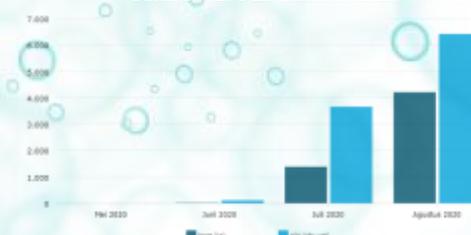
**EKSPOR LOBSTER PANULIRUS**
2019 Kuartal III

Sumber : BPS 29 Oktober 2020

(Ribu Ton) (US\$ Juta)

**EKSPOR BENIH LOBSTER**
(MEI-AGUSTUS 2020)

Sumber : BPS 29 Oktober 2020



MOMENTUM BERANTAS KORUPSI

Rabu (25/11/2020) dini hari. Fokus masyarakat negeri ini terpusat kepada penangkapan seorang menteri bersama keluarga dan sejumlah pejabat lain oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..

Malam harinya KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan budidaya lobster 2020. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini.

Muncul respon cepat Presiden Joko Widodo. Terkait dengan penangkapan anggota kabinernya itu, dia mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Presiden percaya KPK bekerja secara profesional, terbuka, dan transparan. Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan kedua yang terangkut kasus korupsi, setelah Rokhmin Dahuri.

Masih ada dua menteri lagi dalam kabinet Presiden Jokowi yang juga berurusan dengan KPK karena jeratan korupsi: Menteri Sosial Idrus Marham, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Idrus Marham terseret kasus pembangunan PLTU MT Riau-1. Imam

Nahrawi terlibat kasus penyaluran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Idrus Marham dan Imam Nahrawi, menjabat pada periode pertama kepemimpinan Jokowi. Sedangkan Edhy Prabowo menjadi menteri pertama yang terseret perkara korupsi pada periode kedua Presiden Jokowi.

Akhir 2019, rencana izin ekspor benih lobster menjadi sorotan. Polemik berkepanjangan. Menurut catatan, selama kurun waktu 2014-2019 penangkapan dan pengeluaran benih lobster termasuk bagian terlarang. Hal itu mengacu Peraturan Menteri KKP Nomor 56 tahun 2016.

Aturan tersebut oleh Edhy direvisi. Keluar Peraturan No 12/2020 –yang antara lain: ekspor benih lobster diizinkan. Konon, kata Edhy, penangkapan benih lobster punya peluang ekonomi.

Sejak itu aturan baru dan lama menuai sejumlah kontroversi. Pemicunya, antara lain, ketika petunjuk teknis peraturan belum selesai dibikin, sejumlah perusahaan eksportir benih lobster sudah antri.

Sejalan dengan itu ekspor benih lobster tetap melenggang. Dalam setiap pernyataan, Edhy seolah-olah “pasang badan”. Edhy mengeluarkan kalimat: “Banyak ahli di belakang KKP bergelar professor, doktor dan pegiat lingkungan”. Dia memastikan tidak akan mundur dari keputusan itu

Penangkapan Edhy diharapkan menjadi momentum pengembalian kepercayaan publik kepada KPK. Masyarakat berharap, kasus tangkap tangan ini dijadikan titik tolak. Komitmen bersih-bersih di lingkungan pemerintah dan internal partai politik.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK pas lagi menurun. Sang Ketua, Firli Bahuri sempat diperiksa majelis etik. Bahkan mendapat sanksi teguran tertulis. Beberapa lembaga survei membikin jajak pendapat. Hasilnya bisa ditebak: kinerja KPK jeblok!

Saat ini KPK tengah bekerja sekuat tenaga menguak keterlibatan Edhy pada penyalahgunaan izin ekspor lobster. Edhy dan istrinya, Iis Rosita Dewi -yang juga anggota DPR, serta sejumlah pentolan KKP dan pihak swasta sudah ditahan. Mereka belum tentu bersalah. Jangan lupa, ada asas praduga tak bersalah.

Perkara ini bisa menimbulkan kegaduhan. Apalagi dalam konstelasi politik, pasti terjadi tarik menarik. Di lain pihak masyarakat tentu akan melihat. Bisakah secara independen, KPK menjawab keinginan publik. Momentum memberantas korupsi di negeri ini. (*)



ARIFIN BOEDI HARYONO
PEMIMPIN REDAKSI LENTERATODAY

PARTISIPASI DIPREDIKSI JEBLOK, DPRD SURABAYA MINTA KPU GENCARKAN SOSIALISASI

Surabaya- Pemilihan di masa pandemi sarat perdebatan. Risiko penularan virus Covid-19 hingga sosialisasi yang kurang diprediksi berimpilkan terhadap tingkat partisipasi di Pilkada. Pimpinan DPRD Kota Surabaya pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat lebih gencar mensosialisasikan Pilwali Surabaya yang akan digelar pada 9 Desember mendatang kepada warga.

"Semestinya sosialisasi kampanye pilkada di masa pandemi COVID-19 dilakukan KPU secara gencar dan melibatkan semua media, alat, dan perlengkapan kampanye. agar bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih secara masif," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Kamis, (26/11).

Menurut dia, pilkada serentak yang akan digelar 13 hari lagi ini menunjukkan data tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini sesuai dengan prediksi dari KPU RI yang menyebut tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur tergolong sangat rendah. "Ini prediksi ya. Dari 19 Kabupaten/kota di Jawa Timur tingkat partisipasi pemilih berada di angka 67 persen," ujarnya.

Namun, dari angka yang kurang dari 70 persen tersebut tidak diperinci secara detail untuk masing-masing kabupaten/ kotanya. "Dari 19 kabupaten/kota itu tidak disebut-

kan Surabaya berapa, kayaknya itu dirata-rata," katanya.

Atas kondisi tersebut, ia mempertanyakan peran KPU dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada kepada masyarakat. "Karakter masyarakat itu bermacam-macam ada yang aktif ingin tahu dan mencari tahu, ada juga yang tidak mencari tahu," tuturnya.

Reni pun menilai bahwa untuk saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya masih kurang. "Jadi harus ditingkatkan dan KPU tidak bisa sendirian harus melibatkan peran semua pihak termasuk media," katanya.

Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 01 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.

Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 02 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai non-par-



Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti

lemen yakni Partai Perindo.

Sebelumnya, secara nasional Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai jumlah partisipasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 berpotensi alami penurunan jumlah pemilih. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, sebanyak 20-46 persen responden menyatakan tidak akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Sebagai ilustrasi partisipasi pilkada pada 2015 mencapai 70 persen, 2017 sebanyak 74,2 persen, dan pada 2018 mencapai 73,24 persen. "Jadi dikatakan ada sekitar 20-46 persen masyarakat yang enggan atau kemungkinan besar tidak mau datang ke TPS, itu artinya potensi penurunan partisipasi," kata Djayadi. (ard)

3 DIANTARA 38 RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2021 DINILAI PUBLIK BERMASALAH

Jakarta- Sebanyak 38 Rancangan Undang-undang (RUU) masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. RUU tersebut merupakan usulan dari DPR RI sebanyak 26 RUU; Pemerintah 10 RUU; dan DPD RI 2 RUU.

Hal itu dipaparkan oleh Badan Legislatif (Baleg) saat melakukan rapat dengan sejumlah anggota DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. "Panja [Panitia Kerja DPR RI] telah membicarakan dan membahas semua usulan RUU tersebut dalam Rapat Panja yang diselenggarakan pada 24 November 2020," kata Wakil Ketua Baleg cum Ketua Panja DPR, Wily Aditya, Rabu (25/11).

Berdasarkan draf yang diterima dari Baleg

DPR RI, terdapat tiga RUU yang dinilai oleh publik bermasalah yang masuk di dalam Prolegnas Prioritas. Yaitu RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (Usulan DPR); RUU Larangan Minuman Beralkohol (Usulan DPR); dan RUU Ketahanan Keluarga (Usulan DPR).

Baleg telah memberikan draf RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 tersebut kepada seluruh fraksi DPR, DPD RI, dan Kemenkumham. "Untuk itu, mohon kiranya agar Rapat Kerja Badan Legislatif DPR RI bersama Mentei Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang Undang DPD RI ini dapat segera memutuskan, dan segera dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan," ucapnya. (ist)



- 19 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat,
- 20. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 21. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
- 22. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi).
- 23. RUU tentang Ketahanan Keluarga.
- 24. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- 25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji).
- 26. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

38 RUU USULAN UNTUK MASUK PROLEGNAS PRIORITAS 2021

RUU USULAN PEMERINTAH

1. RUU tentang Perubahan atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. RUU tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
3. RUU tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
4. RUU tentang Jabatan Hakim.
5. RUU tentang perubahan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. RUU tentang Perubahan UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.
9. RUU tentang Perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
10. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
11. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law).
13. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
14. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila).
15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,
16. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

RUU USULAN PEMERINTAH

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
3. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 4. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
6. RUU tentang Ibu Kota Negara
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
8. RUU tentang Hukum Acara Perdata
9. RUU tentang Wabah
10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law)

RUU USULAN DPD RI

1. RUU tentang Daerah Kepulauan
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

TEROBOSAN BAKESBANGPOL KABUPATEN BLITAR SUKSESAN PILKADA 2020 DAN BENTUK KAMPUNG ANTI-NARKOBA 2021

BLITAR - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar terus melakukan terobosan, dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020. Selain itu pihaknya juga mempersiapkan terbentuknya Kampung Anti-Narkoba, pada 2021 mendatang.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono menuturkan pihaknya memiliki tugas berat, untuk mensukseskan Pilkada serentak Tahun 2020 ini. "Karena berbeda dengan Pilkada 2010 dan 2015, dimana tahun ini dalam masa pandemi Covid-19," tutur Dicky, Kamis (26/11/2020).

Salah satu indikator suksesnya pelaksanaan Pilkada saat pandemi Covid-19, yakni meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dan penerapan Protokol Kesehatan (Protkes). "Karena pada kondisi normal tidak ada pandemi, Pilkada tahun 2010 dan 2015 partisipasi pemilih hanya sekitar 53 - 55 %," jelasnya.

Apalagi target dari penyelenggara Pilkada yakni KPU, partisipasi warga sebesar 77%. Target ini sebenarnya di bawah partisipasi saat Pileg dan Pilpres pada 2019 lalu, yang mencapai angka 83%. "Sesuai amanat UU pemkab juga memiliki tanggungjawab, untuk mensukseskan Pilkada di daerahnya masing-masing. Maka melalui Bakesbangpol dilakukan berbagai upaya dan terobosan untuk membantunya, karena Rakyat Berdaulat Negara Kuat," ungkap Dicky.

Salah satu terobosannya, membentuk Tim Desk Pilkada, yang selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Mulai tingkat Kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Untuk melakukan sosialisasi, mengenai pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. "Bersama Muspika, PPK, Panwascam dan perangkat desa untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya dan



Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Blitar dalam upaya mensukseskan Pilkada Tahun 2020 dan menjalankan tugasnya menjaga stabilitas daerah

mencegah golput," tandasnya.

Tim Desk Pilkada inilah yang berkeliling melakukan sosialisasi secara langsung maupun secara daring. Langkah ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih, serta bekerja sama dengan Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 mengecek kesiapan penerapan Protkes dengan ketat. "Agar tidak muncul kluster Pilkada, maka wajib hukumnya diterapkan Protkes Covid-19," tegas Dicky.

Pada 2020 ini Bakesbangpol Kabupaten Blitar juga melakukan Workshop mengenai pengelolaan Dana Bantuan Parpol. Dengan mendatangkan pembicara dari Inspektorat dan BPK, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan Dana Bantuan Parpol.

Sementara untuk tahun 2021 mendatang, Dicky mengaku telah menyiapkan konsep pembentukan Kampung Anti-Narkoba. Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Perda tentang Program Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

pada 2019, yang akan segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup). "Karena tidak semua kabupaten memiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) seperti di Kabupaten Blitar, maka sebagai pilot project akan dibentuk Kampung Anti-Narkoba yang akan direalisasikan tahun depan (2021)," terangnya.

Untuk mewujudkan Kampung Anti-Narkoba ini, pada 2020 sudah dibentuk Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Inilah yang akan dikembangkan menjadi Kampung Anti-Narkoba, melalui kerja sama dengan BNN, TNI dan Polri.

Tahun 2021, Bakesbangpol Kab. Blitar juga akan kembali menggalakkan sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang). "Sebab dengan perkembangan jaman, serta arus globalisasi dan kemudahan mengakses berbagai informasi, perlu dilakukan pemahaman kembali Wasbang. Jangan sampai menurun atau luntur terutama generasi muda agar tetap cinta tanah air, bangsa, negara dan ideologinya," beber Dicky.

Bentuk sosialisasi yaitu roadshow ke sekolah-sekolah, atau bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Peningkatan Wasbang ini juga bagian dari kewaspadaan dini atau pencegahan, dari pengaruh ajaran dan paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. "Tim Kewaspadaan Dini didalamnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan jajaran lintas sektoral lainnya seperti Dinkes dan BPBD," kata pria yang pernah menjadi Camat Talun ini.

Ditambahkan Dicky jika Bakesbangpol mempunyai tugas serta fungsi menjadi mata dan telinga bagi kepala daerah, yang harus tahu lebih awal situasi kondisi daerahnya. "Dengan memberikan informasi yang valid dan akurat, untuk pengambilan kebijakan kepala daerah dengan tujuan menjaga stabilitas daerah," pungkasnya. (ais/*)

RISIKO KECELAKAAN TINGGI, PERLINTASAN LIAR DI BALEREJO DITUTUP PT. KAI DAOP 7 MADIUN

MADIUN - PT. KAI Daop 7 Madiun tutup perlintasan sebidang liar di Jalan Babadan - Caruban KM 156 tepatnya di Dusun Suci, Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Selain ilegal, perlintasan tersebut ditutup untuk menekan angka kecelakaan.

Manager Humas PT. KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwindoko menjelaskan, penutupan dilakukan oleh 7 personil dengan cara menanamkan palang besi (bekas potongan rel) ke dalam tanah. Sehingga kendaraan tidak dapat melintasi perlintasan liar tersebut.

Perlintasan liar biasanya dibangun oleh masyarakat untuk mempersingkat waktu dan jarak tempuh akses tanpa harus melewati palang pintu kereta api. Padahal kecelakaan juga sering terjadi di perlintasan ilegal tersebut.

Tak hanya menutup perlintasan liar, PT. KAI Daop 7 juga melakukan penertiban

bangunan-bangunan semi permanen yang berada dekat dengan rel (dibangun di atas tanah milik PT. KAI). Tak hanya itu, pihaknya juga memangkas dahan pohon yang diperkirakan mengganggu jarak pandang masinis.

"Meski pandangan sudah bebas, kami tetap mengingatkan para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan mentaati peraturan yang ada setiap melewati perlintasan sebidang, karena kecepatan KA yang tinggi dan kereta api tidak bisa berhenti mendadak," katanya Kamis (26/11).

Ixfan juga menjelaskan, sebenarnya sosialisasi sudah rutin dilakukan, baik secara langsung dengan turun ke jalan, lewat media massa, bahkan melalui Forum Group Discussion dengan Pemerintah Daerah. Namun tetap saja masih banyak pengendara yang tidak menaati rambu sehingga terjadi kecelakaan.



Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Blitar dalam upaya mensukseskan Pilkada Tahun 2020 dan menjalankan tugasnya menjaga stabilitas daerah

Tercatat sampai dengan 25 November 2020, telah terjadi 41 laka di perlintasan sebidang wilayah Daop 7.

PT. KAI Daop 7 Madiun memiliki 220 perlintasan sebidang yang berada di 3 Kota dan 9 Kabupaten. Dari 220 perlintasan tersebut 28 perlintasan hanya dilengkapi rambu, 113 perlintasan tanpa Early Warning Sistem (EWS), 3 perlintasan dilengkapi EWS dijaga oleh Pemerintah Daerah (Pemda), 76 perlintasan dijaga oleh pihak PT. KAI sendiri. Namun sampai saat ini masih ada 5 perlintasan tidak teregistrasi/liar. (Ger)

MESKI PANDEMI CORONA, KAMPANYE TATAP MUKA TETAP JADI PRIMADONA

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama-sama mengatakan, mayoritas calon kepala daerah masih menjadikan kampanye tatap muka sebagai pilihan utama. Untuk diketahui, kampanye langsung diperbolehkan digelar di tengah pandemi Covid-19, asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Itu masih menjadi primadona, masih menjadi pilihan utama dari para peserta," kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dikutip Kamis (26/11).

Afifuddin mengatakan, berdasarkan data Bawaslu, dalam 10 hari pertama dari sekitar 600-an pasangan calon yang ada di dalam proses pemilihan ini, 8.189 kali kampanye tatap muka dilakukan. Kemudian, 10 hari kedua masa kampanye Bawaslu menemukan sebanyak 16.468 kampanye tatap muka dan 10 hari ketiga mencapai 13.646 kampanye tatap muka. "10 hari keempat 16.000 dan 10

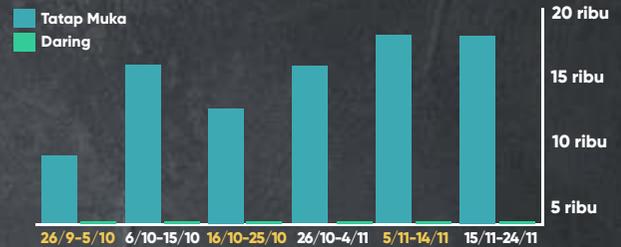
hari kelima kemarin 17.000," ujar Afifuddin.

Namun, kata afifuddin, pembubarannya semakin sedikit. Jika melihat data, pada 10 hari pertama yaitu 26-5 oktober dimana kampanye dimulai, surat peringatan dikeluarkan sebanyak 70 kali dan pembubaran dilakukan pada 48 aktivitas. Kemudian di 10 hari kedua, 6-15 oktober, sebanyak 233 surat peringatan dikeluarkan dan 35 aktivitas dibubarkan.

Pada 16 sampai 25 oktober, 10 hari ketiga, Bawaslu mengeluarkan surat 306 teguran langsung tertulis. kemudian yang dibubarkan hanya 25. Di 26 oktober sampai 4 november, 300 surat peringatan dikeluarkan 33 kampanye tatap muka dibubarkan. Lalu tanggal 5 sampai 14 november, 381 surat peringatan dikeluarkan, dan 17 kampanye tatap muka dibubarkan.

Hal senada diungkapkan KPU bila hingga tanggal 13 Oktober 2020, baru 23 persen pasangan calon (Paslon) yang

METODE KAMPANYE SELAMA PILKADA 2020 (26 SEPT-24 NOV 2020)



menggunakan media dalam jaringan (Daring) dan media sosial (Medsos) untuk kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Sisanya, sebanyak 77 persen paslon masih menggunakan cara lama dengan pertemuan langsung atau kampanye tatap muka.

"Kampanye tatap muka masih dianggap efektif untuk memengaruhi pemilih," kata Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU, Ilham Saputra.(ist)

1

ERI CAHYADI ARMUDJI

CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA

BPJS Kesehatan Gratis Warga Bergaji Maksimal 10 Juta/Bulan

Gratis SMA/SMK Warga Kurang Mampu

Gratis Kuliah 3.000 Anak Muda Per Tahun

Tingkatkan Insentif RT/RW, LPMK, Kader Posyandu, dan Bumantik

Memperbesar Anggaran dan Fasilitas Pendidikan Gratis SD-SMP Negeri

Perbesar Subsidi Sekolah SD-SMP Swasta

CCTV Masuk Kampung Beri Keamanan

Bangun Rumah Sakit di Surabaya Timur dan Selatan

50% Tenaga Kerja Lokal Setiap Investasi Baru

MENERUSKAN KEBAIKAN

CERDAS PEDULI BERPENGALAMAN
PILIHANE! AREK SUROBOYO!

2

MAJU KOTANE MAKMUR WARGANE

PROGRAM UNGGULAN:
Sembako Murah
Dana BLT Rp 1 Juta/KK
Dana RT Rp 150 Juta/RT

CALON WALIKOTA Machfud Arifin CALON WAKIL WALIKOTA Muji Aman

MACHFUD ARIFIN - MUJIAMAN

Calon Walikota & Calon Wakil Walikota Surabaya 2020

SAIKI MA WAE, OJO LIYANE

"Surabaya butuh figur luar biasa seperti Machfud Arifin."

DAHLAN ISKAN
TOKOH MASYARAKAT SURABAYA & JATIM

Machfud Arifin cak.machfudarifin Ir. Muji Aman



**MISI EKSPEDISI BANGKAI
KAPAL TITANIC
DIMULAI BULAN MEI 2020**

Photo by NOAA on Unsplash

Puing-puing kapal Titanic diperkirakan akan segera menghilang karena usia. Tetapi 54 orang yang beruntung dapat menjelajahi bangkai kapal yang menakjubkan pada 2021 sebelum semuanya hancur.

Titanic tenggelam 109 tahun yang lalu, ditemukan 25 tahun yang lalu, dan telah dikunjungi manusia dalam 15 tahun terakhir - diperkirakan kurang dari 200 orang.

Lokasi tenggelamnya kapal itu akan terbuka untuk pengunjung, atau mereka dengan dana sebesar 125.000 dolar AS.

Stockton Rush, presiden OceanGate Expeditions, ingin masyarakat tahu bahwa ini bukan pelayaran mewah: Ini adalah misi.

Dikutip dari Insider (Rabu, 18/11/2020) ada enam perjalanan yang direncanakan mulai bulan Mei tahun 2021, untuk sembilan spesialis misi per perjalanan, dan 36 tiket telah terjual.

Kapal terkenal, yang tenggelam dalam pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris, ke New York City pada tahun 1912 setelah menabrak gunung es, terletak 2,5 mil di bawah air dan 370 mil di lepas pantai Newfoundland, Kanada.

Mereka yang mendaftar untuk salah satu misi sembilan hari Ekspedisi Survei Titanic harus melalui wawancara, serta tes selam satu atau dua hari di Seattle untuk melihat apakah mereka dapat dengan mudah masuk

dan keluar dari kapal selam.

Tamu dalam ekspedisi bahkan tidak disebut tamu. Mereka adalah "spesialis misi" dan dianggap sebagai ilmuwan warga karena mereka akan memiliki instruksi untuk setiap penyelaman tentang apa yang harus mereka lakukan atau cari.

Setelah diterima, spesialis misi harus pergi ke St. John's, Newfoundland, di mana mereka akan mengadakan makan malam orientasi. Keesokan paginya, mereka akan naik kapal untuk berlayar selama 36 jam menuju bangkai kapal, yang juga merupakan situs warisan budaya UNESCO.

Di lokasi, tiga spesialis misi akan membawa kapal selam beranggotakan lima orang ke bangkai kapal bersama seorang peneliti dan pilot, di mana mereka akan menghabiskan tiga hingga lima jam menjelajahi haluan Titanic sebelum kembali naik.

Kapal selam itu direkayasa secara khusus untuk ekspedisi semacam ini dalam dengan bantuan NASA. Ini mungkin salah satu kapal selam pribadi paling berteknologi maju di dunia.

Tujuan utama rangkaian ekspedisi Titanic ini adalah untuk mendapatkan data yang cukup - dalam bentuk foto, video, pemindaian laser, dan sonar - untuk membuat model 3D situs yang imersif.

Tujuan lainnya termasuk menilai kondisi

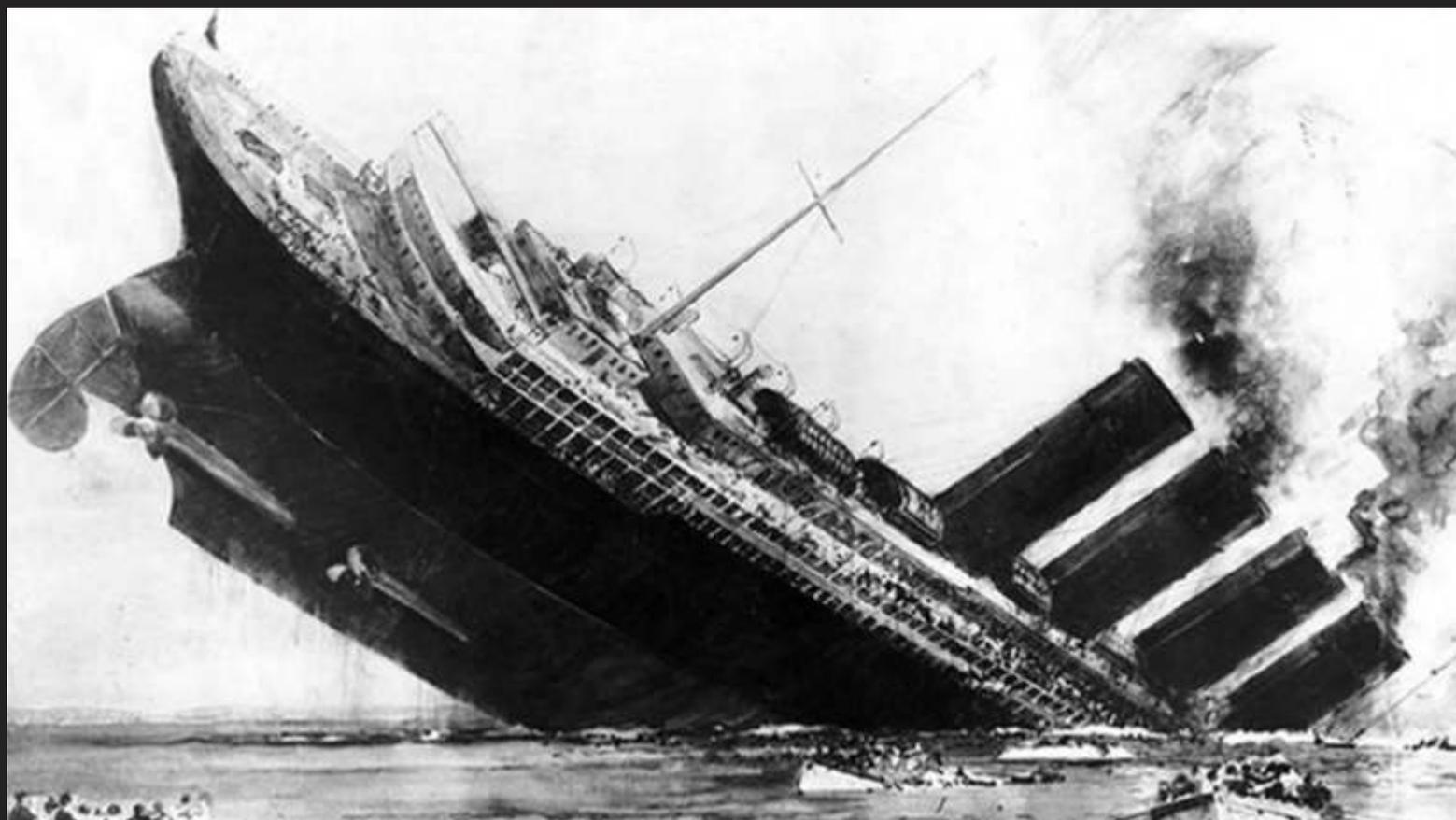


<https://www.thenationalnews.com/>

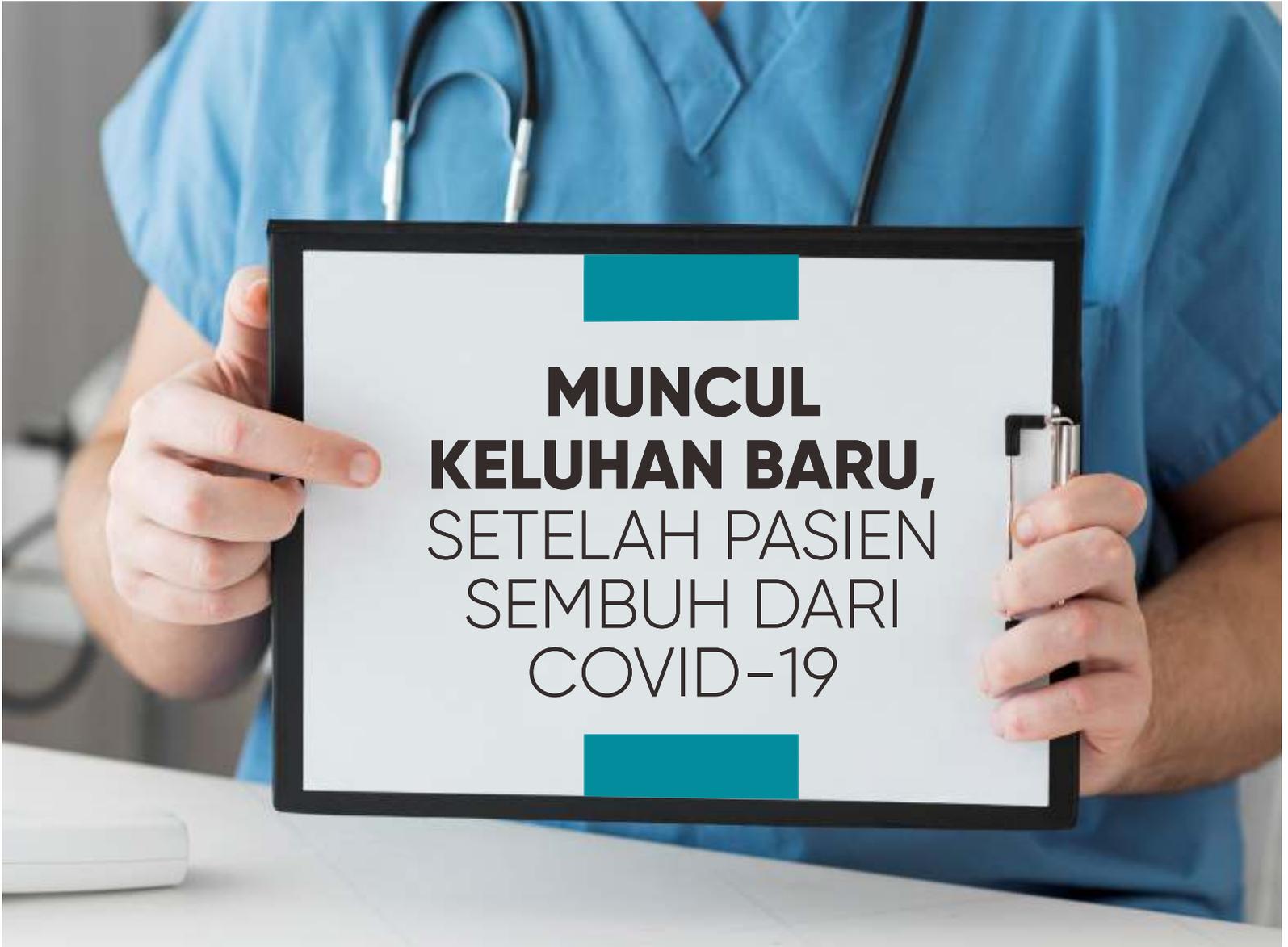
bangkai kapal dan seberapa cepat bangkai kapal membusuk, serta mendokumentasikan kehidupan lautnya.

Karena kapal dan puing-puingnya sangat besar, pendokumentasian bangkai kapal diperkirakan akan membutuhkan banyak ekspedisi selama beberapa tahun ke depan.

Rush mengatakan para tamu dapat melihat segala sesuatu mulai dari 300 spesies kehidupan laut yang telah diidentifikasi sebagai keunikan Titanic hingga kacamata, sepatu, pakaian, dan barang-barang pribadi (Ist).



<https://www.usatoday.com/>



Setelah dinyatakan negatif dari Covid-19, banyak pasien yang masih merasakan masalah kesehatan, sulit bernapas, jantung berdetak cepat, hingga pikiran ber-kabut.

Keluhan-keluhan yang timbul setelah sembuh atau biasa disebut post Covid-19 ini perlu diperiksa lebih lanjut untuk membantu pasien mendapat perawatan yang tepat demi memulihkan kondisinya.

Masalah-masalah yang dikeluhkan di antaranya adalah kesulitan bernapas yang masih kerap terjadi, batuk, demam, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, jantung berdebar-debar, hingga masalah pencernaan.

Efek post Covid-19 seperti ini membutuhkan perawatan lebih lanjut untuk mengetahui akar masalahnya terutama bagi pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di intensive unit care (ICU).

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika (CDC) baru-baru ini mempelajari pasien Covid-19 yang tidak dirawat di rumah sakit. Studi tersebut menemukan bahwa kondisi 1 dari 3 responden tidak kembali bugar seperti sebelum terinfeksi Covid-19 sampai 21 hari berlalu setelah terinfeksi.

Pemeriksaan setelah sembuh dari Covid-19 bisa dilakukan ke dokter spesialis sesuai dengan keluhan yang dirasa, misalnya spesialis paru untuk yang merasakan masalah pada pernapasan. Meski begitu, keluhan post Covid-19 syndrome memerlukan pemeriksaan menyeluruh sebelum menentukan tindakan apa yang diperlukan.

Jika mengatakan perawatan pada setiap pasien post Covid-19 berbeda-beda bagi setiap individu.

Di Jakarta, penanganan khusus untuk pasien yang mengalami gejala jangka panjang dari infeksi coronavirus ini baru disediakan oleh Rumah Sakit Mayapada di Post Covid Recovery & Rehabilitation Center (PCRR Center).

Unit ini ditangani oleh dokter dengan berbagai latar belakang seperti spesialis paru, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis rehabilitasi, psikiater, dan beberapa bidang lainnya.

Pasien yang datang PCRR Center ini akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan darah untuk melihat bagaimana dampak Covid-19 pada beberapa organ

seperti ginjal, pankreas, liver, dan faktor risiko pembekuan darah.

Keseluruhan pemeriksaan tersebut berguna bagi dokter untuk mengetahui apakah keluhan pasien disebabkan oleh faktor fisik atau psikologis.

Setelah ditentukan penyebab gejala jangka panjang usai sembuh dari Covid-19, pasien akan diberikan perawatan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Perawatan yang dimaksud misalnya terapi otot pernapasan, pengobatan-pengobatan pada organ yang terganggu, atau konsultasi psikologis.

Pusat perawatan post Covid-19 di rumah sakit memang menawarkan perawatan holistik untuk membantu pasien pulih ke kondisi normal (ist).





Honda Motor meluncurkan mobil barunya, Honda City Hatchback yang hanya tersedia dalam tipe sedan. Mobil ini sudah masuk pasar di Asia dengan harga yang cukup kompetitif di kelasnya..

Meskipun diadopsi dari model City indukannya, City Hatchback hadir dengan desain yang lebih segar, dengan ukuran roda besar 16 inci dan garis-garis samping lebih tegas dan berani, sementara kabinnya terlihat lebih longgar.

Desain Honda City Hatchback tampak lebih sporty, dengan berhias desain baru lampu LED di belakang, serta antena tetap dipertahankan di bagian belakang atas. Sementara gril depannya terbagi dalam dua bagian yang dipisahkan oleh pilar untuk plat nomor kendaraan.

Pada sisi dalam, Honda berusaha membuat ruang kabin lega pada City Hatchback, dengan desain kursi baris dua bisa dilepas rata dan kursi depan kiri bisa direbahkan untuk memperluas ruang bagasi saat membawa banyak barang.



Ruang bagasinya juga tampak longgar, sementara interiornya dengan warna baru, piano black yang berpenampilan elegan meski desainnya simpel.

Di bagian tengah dashboardnya, Honda menyematkan layar 8 inci untuk hiburan dan navigasi yang tentu sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Google Maps serta

Honda Connect untuk memudahkan pemilik mendapatkan pelayanan.

Menariknya, untuk yang diluncurkan di Thailand, City Hatchback ini dibekali mesin 1.0 liter VTEC Turbo dengan keluaran tenaga maksimum 122 PS, sementara pada roda kemudinya sudah dilengkapi 7-speed paddle shift yang memungkinkan pengendara mengontrol transmisi CVT matic dari roda kemudi. Honda City Hatchback.

Di Thailand, City Hatchback tersedia dalam tiga varian, S+, SV, dan RS, dengan pilihan warna ignite red metallic, platinum white pearl, meteoroid gray metallic, sonic gray pearl, crystal black pearl, dan taffeta white.

Dengan membawa fitur keamanan terbaru Honda, termasuk ABS dan Vehicle Stability Assist (VSA), ISOFIX & Child Anchor, Hill Start Assist (HSA), dan Emergency Stop Signal (ESS), Honda City Hatchback ditawarkan dengan harga mulai 599.000 baht atau sekitar Rp280 juta. Demikian mengutip Honda Thailand (Rabu, 25/11/2020) (Ant).

Foto : Hannah Morgan/Unsplash

SIMAK PAKAIAN PALING AMPUH SEMBUNYIKAN PERUT BUNCIT

Cross Over Tops

Blus yang satu ini juga memiliki tampilan kerah V neck, cutting yang cukup longgar dan loose dibagian perut sehingga sangat ampuh digunakan untuk menyamarankan perut buncit dengan tampilan yang tetap stylish.

Loose Dress

Dress yang satu ini memiliki potongan longgar sehingga bisa menyamarankan perut buncit, apalagi jika kamu memilih warna-warna gelap seperti hitam, dark grey, emerald dan lain-lain. Agar penampilan kamu tidak begitu membosankan dengan loose dress, cobalah untuk menambahkan ikat pinggang atau gunakan outer

Tunic

Tunik adalah salah satu pakaian perempuan yang ukurannya dibuat lebih panjang sampai melewati batas panggul. Model pakaian yang satu ini sangat multifungsi karena bisa kamu gunakan untuk acara formal hingga casual, tinggal mencocokkan aksesoris yang tepat saja. Cutting dari tunic juga sedikit longgar sehingga bisa menyembunyikan perut buncit.

Celana Berpotongan Lurus

Dibanding menggunakan skinny jeans atau semacamnya, lebih baik kamu memilih celana berpotongan lurus yang identik lebih longgar. Celana jenis ini bisa menyeimbangkan penampilan kamu mulai dari bagian perut, paha hingga kaki.

Wrap

Wrap dress ataupun blouse juga salah satu model pakaian yang recommended untuk menyembunyikan perut buncit. Biasanya pakaian ini memiliki detail tali atau pita di bagian perut sehingga perut buncit bisa tersamarankan. Apalagi bagian kerah yang cenderung V sehingga memberikan ilusi tubuh lebih langsing dan leher lebih jenjang.

Peplum

Peplum adalah model pakaian yang sangat ampuh membuat perut buncit tersamarankan. Bahkan ketika kamu ingin menggunakan rok pensil sekalipun, bagian perut akan tetap aman. Banyak sekali pakaian dengan model peplum yang recommended, mulai dari blouse, mini dress, sleeveless dress, semuanya ampuh digunakan untuk menyembunyikan perut buncit. (Ist)



Terbentur Benur, (dari hal 1)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran atau SPWP untuk ekspor benih bening lobster atau BBL. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor B. 22891/PJPT/PI.130/XI/2020 tertanggal Kamis, 26 November 2020.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengkonfirmasi bahwa Kementerian memang akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekspor benih lobster. "Akan kami evaluasi," tutur Antam.

Dalam surat itu disebutkan kementerian akan memperbaiki tata kelola BBL seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 di wilayah pengelolaan perikanan. Kementerian juga akan mempertimbangkan proses revisi beleid tersebut.

"Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," begitu isi surat ini. Bagi perusahaan yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house, Kementerian memberikan waktu ekspor hingga Jumat, 27 November.

Surat penyetapan SPWP terbit setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Menteri KKP yang telah mengundurkan diri itu terjatuh dugaan kasus suap izin usaha perikanan. Bersama Edhy, enam orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik Chandra Astan mengatakan pengusaha akan menanggung potensi kerugian atas investasi yang telah dikeluarkan. "Ada investasi yang sudah meluncur yang saat ini jumlahnya sudah 50 ribu nelayan. Potensi kerugian pasti ada karena investasi tidak akan mungkin kembali dalam waktu dekat," ucapnya.

Candra berharap program ekspor benih lobster ditata kembali oleh KKP dengan tujuan yang baik. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang mengaburkan tujuan program ekspor sebenarnya, yakni kesejahteraan nelayan.

Meski dalam surat dikatakan eksportir diberi waktu hingga Jumat (27/11) hari ini, tapi di lapangan pada Rabu (25/11) ekspor tidak bisa dilakukan. Sebanyak 20 eksportir gagal mengirimkan benih lobster ke Vietnam tepat pada hari penangkapan Edhy Prabowo. Jumlah komoditas benih yang akan diekspor ditaksir mencapai 500 ribu ekor. "Kerugian hari ini kalau ditotal 500 ribu ekspor kali Rp 20 ribu mencapai Rp 10 miliar," ujar Chandra.

Pengiriman benur terhalang karena KKP tidak dapat menerbitkan surat keterangan waktu pengeluaran (SKWP). Menurut informasi yang diperoleh pengusaha, tak ada satu pun pejabat berwenang yang bisa meneken dokumen ini.

SKWP merupakan dokumen khusus yang

harus dipenuhi eksportir sebelum mengirim benur ke luar negeri. Penerbitan surat harus mendapat persetujuan dan penandatanganan dokumen oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Chandra menjelaskan, potensi kerugian harus ditanggung akibat kerusakan komoditas hewan hidup. Sebab, benih tak bisa diterbangkan ke negara tujuan sesuai waktu yang telah diestimasi.

Ketua Harijan DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengapresiasi penangkapan Edhy Prabowo. "Indikasi kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat teras KKP menyakitkan hati nelayan kecil yang masih terus berjuang di tengah segala keterbatasan," ujarnya. "Kedua, ia melanjutkan, jika penangkapan ini hasil dari pengembangan kasus izin ekspor benih lobster, langkah KPK patut diapresiasi. "Pat gulipat kebijakan yang menghasilkan para pemburu rente di lingkaran kekuasaan yang serakah," sambungnya.

Dani menilai, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi dan mendeteksi dengan jelas setiap aturan dan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Terlebih pada kasus ekspor benih lobster, yang dianggap membuka peluang bagi pencairan rente sehingga merugikan negara dan masyarakat. "Nah, dalam kasus ekspor benih lobster, indikasi-indikasi ke arah itu dirasa meyakinkan. Selain soal lobster, juga rencana misalnya legalisasi alat tangkap yang merusak lingkungan," tegas dia.

Sementara mengenai perkembangan kasus, Kamis (26/11) Edhy pertamakali diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu, 2 tersangka yang

sempat tak terjaring OTT KPK akhirnya menyerahkan diri.

Keduanya ialah staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang bernama Andreau Pribadi Misata serta satu orang swasta bernama Amiril Mukminin. Meski tak itu tertangkap dalam OTT, keduanya tetap dijerat sebagai tersangka karena bukti permulaan yang cukup.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyebut kedua tersangka sudah menghadap penyidik pada pukul 12.00 WIB, Kamis (26/11). "Secara kooperatif telah menyerahkan diri dan menghadap penyidik KPK," ujar Ali. Keduanya diduga bersama Edhy Prabowo menerima suap miliaran rupiah terkait izin ekspor benih lobster. Tersangka penerima suap lainnya ialah stafus Menteri Edhy yang bernama Safri, staf istri Menteri Edhy yang bernama Ainul Faqih, serta pengurus PT Aero Citra Kargo bernama Siswadi.

Untuk Andreau, ia diduga merupakan Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada Kementerian KP. Ia diduga yang mengarahkan calon eksportir agak memakai jasa PT Aero Citra Kargo bila ingin melakukan ekspor benih lobster.

Sementara Amiril diduga merupakan salah satu pengurus PT Aero Citra Kargo. Perusahaan-perusahaan calon eksportir diduga harus menyetor sejumlah uang ke rekening PT Aero Citra Kargo untuk mendapat izin ekspor.

Uang yang terkumpul diduga ialah untuk Edhy Prabowo. Sebab, ia diduga sebagai pemilik asli dari perusahaan tersebut. (ist,ins)

4 KEBIJAKAN KONTROVERSIAL MENTERI EDHY

MEMBUKA EKSPOR BENIH LOBSTER

Pada era Susi Pudjiastuti, terbit Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Larangan inilah yang masuk daftar Edhy untuk direvisi.

BOLEHKAN ALAT TANGKAP CANTRANG

Edhy Prabowo mengaku telah melakukan kajian terkait keluarnya izin penggunaan cantrang. Sebelumnya, larangan cantrang dan 16 alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan lainnya mulai diberlakukan tahun 2018. Larangan alat tangkap cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 2 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016. Edhy mengaku, ada sejumlah pihak yang mengklaim penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan.

PENCABUTAN BATASAN UKURAN KAPAL

KKP mencabut Surat Edaran Nomor B.1234/DJPT/PI.410/D4/31/12/2015 tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan pada surat izin usaha perdagangan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Saat itu, Menteri Susi mengeluarkan aturan yang melarang kapal di atas 150 GT untuk menangkap ikan di perairan ZEE.

TINGGALKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN

Rencana menghapus hukuman penenggelaman kapal juga tengah jadi pertimbangan Edhy. Edhy mengatakan, kapal yang harus ditenggelamkan hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap. Adapun kapal yang ditangkap dan perkaranya mendapat putusan hukum tetap lebih baik diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan.

KERUMUNAN RIZIEQ DIPROSES PIDANA

Bandung-Polda Jawa Barat menaikkan status perkara pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Rizieq Shihab di Bogor, Jawa Barat, ke tahap penyidikan. Penyidik pun segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahu kejaksaan, dan berproses sampai nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol CH Patoppoi di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/11).

Adapun, menurutnya pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka itu yakni pihak penyelenggara kegiatan, bahkan juga pemilik lokasi Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markaz Syariah DPP FPI. "Kemungkinan yang melakukan pidana, istilahnya potensi suspect [tersangka] itu penyelenggara, atau mungkin berdasarkan alat bukti mungkin bisa ke pemilik atau pendiri pondok pesantren (jadi tersangka)," katanya.

Adapun kegiatan Rizieq Shihab itu berlangsung di Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markaz Syariah DPP FPI, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (13/12) lalu. Kegiatan itu berlangsung dengan berkerumunnya warga pada saat kedatangan Rizieq Shihab. Dia juga menyebut pemilik pondok pesantren itu diduga adalah Rizieq Shihab itu sendiri.

Berdasarkan penyelidikan, menurutnya Rizieq Shihab telah mendirikan pondok pesantren itu sejak 2012 silam. Pada laman markazsyariah.com juga menyebutkan Rizieq sebagai pendiri pondok pesantren tersebut. "Kami temukan diduga bahwa pemilik pondok pesantren itu adalah HMR [Rizieq Shihab], yang didirikan sejak tahun 2012. Upaya imbauan oleh Satgas COVID-19



tidak dipatuhi, jadi kegiatan tetap berlangsung," katanya.

Meski begitu, ia pun menyebut pondok pesantren diperbolehkan beroperasi di Bogor. Namun berdasarkan aturan Bupati Bogor, pondok pesantren tidak diperbolehkan menerima kunjungan. Selain itu, menurut Patoppoi kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 3.000 orang. Sehingga diduga kegiatan tersebut melanggar aturan protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Pada hal, menurutnya aturan dari Bupati Bogor mewajibkan kegiatan harus dibatasi jumlah pengunjungnya maksimal 50 persen dari total kapasitas atau maksimal sebanyak 150 orang. "Penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, bahwa diduga ada upaya menghalang-halangi penanggulangan wabah, dan penyelenggara kekarantinaan kesehatan," kata Patoppoi.

Dalam kasus ini, polisi menggunakan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Pasal 93 Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Pasal 216 KUHPidana.

Periksa di Rumah Sakit Bogor

Terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut, saat ini Habib Rizieq Shihab berada di RS Ummi untuk melakukan general check up. Ia menyebut, dari hasil observasi menunjukkan hasilnya baik.

"Ya saya sudah dilaporkan Habib Rizieq saat ini sedang proses general cek-up, untuk dilakukan observasi secara menyeluruh terhadap kesehatan beliau di salah satu rumah sakit yang masuk wilayah administratif Bogor Selatan," kata Bima Arya Kamis (26/11).

Bima Arya mengaku mendapat informasi tersebut langsung dari pimpinan rumah sakit tempat Habib Rizieq melakukan general check up. "Pimpinan rumah sakit tersebut menyampaikan kepada saya, saat ini kondisi Habib dalam keadaan baik. Telah dilakukan pengecekan secara menyeluruh dan hasilnya juga sejauh ini baik," kata Bima Arya.

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dirawat di rumah sakit di RS UMMI, Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan Habib Rizieq masih diobservasi oleh tim dokter di rumah sakit tersebut.

"Betul, beliau sedang check up di sana. Sejahter ini masih diobservasi saja," kata Bima Arya. Bima Arya menyatakan Habib Rizieq tidak menunjukkan gejala terkena COVID-19. Dia hanya menyatakan bahwa Habib Rizieq ke rumah sakit tersebut untuk memeriksakan kesehatan. "Tidak ada gejala COVID," jelas Bima. (ist,ins)

PASAL-PASAL PENJERAT KERUMUNAN RIZIEQ

PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR

(Ayat 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(Ayat 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PASAL 93 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PASAL 216 KUHP

(Ayat 1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.